

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi penyusunan Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang disusun berdasarkan isu strategis Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintahan dan tercapainya tujuan-tujuan strategis dari Pemerintah Kabupaten. Penjenjangan Kinerja yang diterapkan di Kabupaten Banyumas telah berusaha mengakomodasi kebutuhan pengembangan kapasitas dan akuntabilitas aparatur di berbagai level pemerintahan dalam bentuk Pohon Kinerja. Hal ini berperan penting dalam menciptakan struktur yang jelas dan terukur, sehingga setiap individu dalam pemerintahan memiliki pedoman yang jelas untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, terutama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas sebagai OPD yang memiliki peran sentral dalam penyusunan Penjenjangan Kinerja sebagai Badan yang memiliki tugas dan fungsi Perencanaan.

Namun demikian, implementasi Penjenjangan Kinerja tersebut masih dihadapkan pada beberapa kendala, terutama pada Penyusunan Penjenjangan Kinerja RPD 2024-2026 yang telah disusun belum menggunakan Critical Success Factor dalam tahapan penyusunannya, tetapi kendala tersebut kini telah diperbaiki dalam penyusunan Penjenjangan Kinerja untuk dokumen perencanaan RPJMD

2025-2029 yang dimana dalam penyusunannya kini sudah memperhatikan seluruh tahapan yang tercantum dalam pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja. Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan, yaitu: a. menentukan Hasil (outcome) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja; b. menentukan faktor kunci keberhasilan (critical success factor); c. menguraikan faktor kunci keberhasilan (critical success factor) kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional; d. merumuskan Indikator Kinerja; dan e. menerjemahkan Pohon Kinerja ke dalam komponen perencanaan dan Kinerja jabatan.

Dalam hal koordinasi antarunit pemerintahan dan keselarasan antara kebijakan pusat dengan kebijakan daerah. Beberapa faktor kendala lainnya seperti sumber daya manusia yang belum merata terkait pemahamannya dalam penyusunan Penjenjangan Kinerja sehingga terkadang terjadi perbedaan persepektif antar SDM penyusun tetapi hal tersebut bisa diatasi dengan berbagai solusi, seperti diadakannya rapat koordinasi bersama organisasi bagian Sekretariat Daerah, lalu FGD secara internal, kemudian berkoordinasi langsung dengan Kemenpan dan dari Provinsi seperti Bappenas juga menjadi solusi dalam pengoptimalan penyusunan Penjenjangan Kinerja. Meskipun sudah ada upaya untuk memperbaiki dan menyusun sistem yang lebih efisien, hambatan-hambatan ini memerlukan perhatian lebih lanjut agar hasil yang diinginkan dapat tercapai secara maksimal.

Secara keseluruhan, penyusunan penjenjangan kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas berpotensi menjadi instrumen penting dalam mengoptimalkan tata kelola pemerintahan. Untuk mencapai hasil yang maksimal, diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, instansi terkait, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Penjenjangan kinerja yang efektif dapat memperkuat implementasi kebijakan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memajukan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

5.2. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini terkait implementasi penyusunan Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan isu strategis optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek.

Pertama, bagi aspek Kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pengembangan kebijakan penjenjangan kinerja yang lebih terstruktur dan berbasis pada hasil evaluasi yang akurat, sehingga isu strategis Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Banyumas dapat terselesaikan dan berjalan dengan optimal. Penjenjangan kinerja yang berorientasi pada hasil juga akan mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan relevan dengan isu strategis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kedua, aspek Manajerial dan Organisasi, dari segi manajerial penelitian ini menyarankan pentingnya penyusunan penjenjangan kinerja (pohon kinerja) sebagai alat untuk memetakan tugas dan tanggung jawab setiap elemen pemerintahan secara

lebih terstruktur. Hal tersebut berimplikasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi pemerintahan Kabupaten Banyumas khususnya pada perencanaan di Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.

Ketiga, aspek pengukuran dan evaluasi kinerja, dalam aspek ini, penyusunan penjenjangan kinerja yang berbasis pada indikator-indikator yang jelas dan terukur sesuai dengan ketentuan pada pedoman yang ada di Permenpan RB No.89 tahun 2021 maka memungkinkan penilaian kinerja yang lebih optimal. Implikasi dari hal tersebut adalah peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kebijakan.

Keempat, aspek pengelolaan tata kelola pemerintahan, implikasi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah perlunya penataan sistem pengawasan dan evaluasi yang lebih baik dalam rangka memastikan bahwa penjenjangan kinerja dapat diterapkan secara konsisten Hal ini berhubungan dengan pentingnya koordinasi antarunit pemerintahan dan penyelarasan antara kebijakan yang diambil, isu strategis dengan kondisi di lapangan.

Dengan demikian, penting bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk terus mendorong inovasi dalam sistem penjenjangan kinerja pada sector perencanaan, serta memastikan bahwa setiap elemen pemerintahan atau stakeholder terlibat dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan menyelesaikan isu strategis yang ada di Pemerintah Kabupaten Banyumas.